

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Salah satu persoalan lingkungan yang paling sering dihadapi adalah masalah pengelolaan sampah. Sampah merupakan material sisa hasil aktivitas yang dibuang sebagai hasil dari proses produksi, baik itu dalam industri maupun rumah tangga. Pertumbuhan jumlah penduduk, perubahan pola konsumsi masyarakat, serta perkembangan wilayah permukiman yang semakin pesat menyebabkan peningkatan volume sampah setiap tahunnya. Jika tidak dikelola secara baik dan berkelanjutan, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas estetika lingkungan, serta berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir.

Secara umum, pengelolaan sampah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang tanggung jawab bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Kebijakan ini mendelegasikan kewenangan pengelolaan sampah ke pemerintah daerah melalui otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022).

Di tingkat kabupaten, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah sebagai landasan hukum utama. Perda ini mengatur pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemanfaatan sampah secara sistematis, menyeluruh, dan berkelanjutan, dengan melibatkan pemerintah desa, masyarakat, dan swasta. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2025, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 34.784,50 ton per tahun. Namun, tingkat pengelolaan sampah masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari tidak adanya kegiatan pengurangan sampah (0,00%) serta daur ulang yang juga belum berjalan (0,00%). Sementara itu, jumlah sampah yang ditangani hanya sebesar 93,78 ton per tahun atau sekitar 0,27% dari total timbulan sampah. Dengan demikian, total sampah yang terkelola juga hanya mencapai 0,27%. (sumber: Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK tahun 2025, <https://sipsn.kemenlh.go.id/sipsn/public/data/capaian>) Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum mendapatkan penanganan yang optimal.

Desa Lok Bangkai sebagai salah satu desa di Kecamatan Banjar Kabupaten Hulu Sungai Utara. Secara geografis, desa ini berada di kawasan yang dekat dengan aliran sungai, kondisi tersebut menjadikan pengelolaan sampah menjadi sangat penting untuk mencegah pencemaran lingkungan. Berdasarkan data Jembatan Timbang, jumlah sampah yang dihasilkan dan terangkut dari Desa Lok Bangkai selama bulan April mencapai 10.430 kg atau sekitar 10,43 ton. Jika dihitung berdasarkan rata-rata mingguan, volume sampah

yang dihasilkan mencapai sekitar 2.607,5 kg per minggu. Dengan jadwal pengangkutan sampah yang dilakukan dua kali dalam seminggu, maka rata-rata volume sampah yang diangkut dalam setiap kali pengangkutan adalah sekitar 1.303,75 kg atau sekitar 1,30 ton. Meskipun demikian, pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai masih menghadapi berbagai tantangan. Dari aspek perilaku masyarakat, sebagian warga masih belum melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga. Sampah umumnya dikumpulkan dalam satu wadah, dan dibuang tanpa proses pemilahan. Dari sisi sarana dan prasarana, tempat sampah yang disediakan masih terbatas dan belum memadai, serta sistem pengangkutan sampah belum berjalan secara optimal. Dalam pelaksanaannya Desa Lok Bangkai memiliki 4 petugas sampah yang menangani 8 RT, 2 orang bertugas sebagai petugas pengangkut atau pemuat sampah, sedangkan 2 orang lainnya bertugas pengantaran sampah ke TPA. Namun, jumlah petugas tersebut dinilai masih belum sebanding dengan luas wilayah dan jumlah RT yang harus dilayani, sehingga berdampak pada belum maksimalnya pelayanan pengangkutan sampah. Keterbatasan ini menyebabkan masih adanya penumpukan sampah di beberapa titik serta keterlambatan dalam proses pengangkutan. Dalam konteks kebijakan, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum adanya pengawasan.

Adapun fenomena-fenomena yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagai berikut:

1. Pemilahan sampah rumah tangga dari sumbernya belum diterapkan secara optimal.

Sebagian besar masyarakat di Desa Lok Bangkai masih mencampur sampah organik dan anorganik dalam satu wadah di rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemilahan sampah dari sumbernya belum diterapkan secara optimal. Berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, sampah seharusnya dipilah dari sumbernya atau dikelompokkan sesuai jenis sampah. Namun berdasarkan hasil pengamatan peneliti di Desa Lok Bangkai (maret 2026) belum ada pemilahan dari sumbernya. *(Sumber:Dokumentasi Peneliti 2026 dan informasi dari petugas sampah)*

2. Keterbatasan sarana tempat sampah

Fasilitas tempat sampah di lingkungan desa masih terbatas. Saat ini hanya tersedia satu jenis tempat sampah (tong) untuk setiap wilayah, tanpa pemilahan jenis sampah. Sehingga masyarakat tidak memiliki fasilitas untuk memisahkan sampah organik dan anorganik. Berdasarkan data profil Desa Lok Bangkai, terdapat 25 unit tong sampah yang di distribusikan pada 8 RT Di Desa Lok Bangkai, 1 unit armada pengangkut sampah dan 4 petugas sampah. Jumlah tersebut masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang efektif. *(Sumber:Data profil Desa Lok Bangkai bagian sarana dan prasarana kebersihan)*

3. Terjadinya penumpukan sampah pada tempat sampah

Penumpukan sampah sering terjadi pada tempat sampah hal ini disebabkan karena respons petugas yang kurang cepat dalam menangani penumpukan sampah, ini menunjukkan belum optimalnya komitmen dan tanggung jawab petugas, serta frekuensi pengangkutan sampah yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan armada pengangkut, yaitu 1 unit armada pengangkut sampah untuk melayani 8 RT, juga menjadi penyebab proses pengangkutan sampah tidak berjalan optimal. Selain itu sistem pengelolaan sampah masih menggunakan pola angkut-buang dimana sampah diangkut kemudian langsung dibuang ke TPA tanpa pemilahan lebih lanjut. Kondisi ini mencerminkan belum adanya SOP serta lemahnya koordinasi antar pelaksana. *(Sumber: Dokumentasi peneliti dan Data profil Desa Lok Bangkai bagian sarana dan prasarana kebersihan)*

4. Kurangnya sosialisasi mengenai pengelolaan sampah

Sosialisasi terkait pengelolaan sampah di Desa Lok Bangkai pernah dilakukan, namun kegiatan tersebut sudah berlangsung lama dan hingga saat ini belum terdapat sosialisasi terbaru secara langsung, sosialisasi terbaru hanya ada pembagian stiker pemilahan dari Dinas Perkim-LH. Akibatnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih relatif rendah karena sosialisasi dari pemerintah masih terbatas. *(Sumber: Stiker Pemilahan sampah 2026 dari Dinas Perkim-LH).*

Melihat fenomena masalah diatas, maka peneliti mengangkat penelitian dengan berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013

Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara”.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, difokuskan pada Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka yang jadi fokus permasalahan dalam penelitian ini menurut George C. Edward III (Joko Pramono 2020:4) yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, agar sejalan dengan Batasan masalah dan agar penelitian ini lebih terarah serta tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dikemukakan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Lok Bangkai Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara.

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi mahasiswa dan peneliti lain yang tertarik pada studi tentang implementasi kebijakan publik, khususnya tentang Pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan teori terkait peningkatan pengelolaan sampah.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dan pihak terkait dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah yang ada, serta menjadi pertimbangan bagi instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif terkait pengelolaan sampah ditingkat desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar, serta menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa.